



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI
Jalan Raya Warujayeng - Nganjuk

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI**

Handwritten signature and date: 15/2/20

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI**

Handwritten signature and date: 15/2/24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-7
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024.....	III-8
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....	III-8
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024.....	III-10
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.....	III-14
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025.....	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-7
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....	III-8
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....	III-8
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024.....	III-10
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.....	III-14
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025.....	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI

PERATURAN DESA MALANGSARI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGSARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Malangsari Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Malangsari

Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Malangsari Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI
dan
KEPALA DESA MALANGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Malangsari.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Malangsari dibantu Perangkat Desa Malangsari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Malangsari.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Malangsari.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Malangsari.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Malangsari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangsari.

Ditetapkan di Malangsari
pada tanggal 30 September 2024

KEPALA DESA MALANGSARI,

MUJIANTO

Diundangkan di Malangsari
pada tanggal 15 Oktober 2024.

SEKRETARIS DESA MALANGSARI,

ENDANG PURWANTI

LEMBARAN DESA MALANGSARI TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DESA MALANGSARI

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Malangsari Tahun 2019 - 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Malangsari ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Malanghari serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2025, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2025 sebesar Rp 2.045.409.400,- (Dua milyar Empat puluh lima juta Empat ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
4.	Pendapatan	1.562.549.900	2.045.409.400	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	170.675.000	170.675.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.000.000	2.000.000	
4.1.2.	Hasil Aset	166.275.000	166.275.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	2.400.000	2.400.000	
4.2.	Transfer	1.390.674.900	1.773.534.400	
4.2.1.	Dana Desa	805.606.000	1.137.635.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	60.122.400	60.489.400	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	474.946.500	475.410.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0	100.000.000	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	50.000.000	100.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000	1.200.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	1.200.000	1.200.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.562.549.900	2.045.409.400	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Proyeksi Belanja Desa Malangsari sebesar Rp. 2.045.409.400,- (Dua milyar empat puluh lima juta empat ratus Sembilan ribu empat ratus rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	793.137.400	772.877.400	
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan belanja siltap,tunjangan,operasional	623.222.964	577.385.400	
1.1.01	Kegiatan Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	36.690.000	36.690.000	
1.1.02	Kegiatan Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	286.964.400	286.964.400	
1.1.03	Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	20.656.164	21.856.000	
1.1.04	Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK,honor PKPKD dan PPKD)	52.772.400	55.005.000	
1.1.05	Penyediaan tunjangan BPD	17.100.000	17.100.000	
1.1.06	Penyediaan operasional BPD	5.075.000	13.000.000	
1.1.07	Penyediaan insentif/operasional rt/rw	28.190.000	25.200.000	
1.1.08	Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa	23.000.000	23.800.000	
1.1.99	Lain-lain sub bidang siltap dan operasional pemerintahan Desa	152.775.000	152.775.000	
1.2	Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa	102.735.936	45.000.000	
1.2.01	Penyediaan sarana (Aset tetap)perkantoran/pemerintah	21.500.000	15.000.000	
1.2.02	Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa	54.180.936	5.000.000	
1.2.03	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa	27.055.000	25.000.000	
1.3	Pengelolaan administrasi kependudukan,pencatatan sipil,statistik,dan kearsipan	4.396.000	9.600.000	
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		1.000.000	
1.3.02	Penyusunan,pendataan,dan pemutakiran profil desa	2.636.000	2.500.000	
1.3.03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan		2.000.000	
1.3.04	Penyuluhan dan penyadaran		1.600.000	

	masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil			
1.3.05	Pemetaan dan Analisis kemiskinan desa secara Partisipatif	1.760.000	2.500.000	
1.4	Penyelenggaraan tata praja pemerintahan perencanaan, keuangan dan pelaporan	27.237.500	43.725.000	
1.4.01	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes	3.360.000	2.000.000	
1.4.02	Penyelenggaraan musyawarah desa Lainnya (Musdus, Rembug desa)	4.240.000	2.625.000	
1.4.03	Penyusunan Dokumen perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDes dll)	11.865.000	6.300.000	
1.4.04	Penyusunan dokumen keuangan Desa		6.000.000	
1.4.05	Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa	2.665.000	3.300.000	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa		1.300.000	
1.4.07	Penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa dan informasi kepada masyarakat	307.500	1.600.000	
1.4.08	Pengembangan informasi Desa	0	2.000.000	
1.4.09	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Desa	0	600.000	
1.4.10	Dukungan & Sosialisai pelaksanaan pelaksanaan pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan	0	500.000	
1.4.11	Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa	0	7.500.000	
1.4.90	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi peningkatan perangkat desa	0	10.000.000	
1.4.91	Forum pembina Desa	4.800.000	4.800.000	
1.5	Sub bidang pertanahan	35.545.000	38.700.000	
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		5.000.000	
1.5.02	Administrasi Pertanahan		3.000.000	
1.5.05	Penyuluhan Pertanahan		2.500.000	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	27.045.000	20.900.000	
1.5.90	Penetapan dan Penegasan batas desa	8.500.000	3.000.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		958.120.000	
5.2.1	Sub Bidang Pendidikan	348.000.000	49.800.000	
5.2.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah Non Formal Milik Desa	41.400.000	41.800.000	
5.2.02	Dukungan penyelenggaraan Paud		5.000.000	
5.2.1.06	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengadaan	300.000.000	0	

	sarana/prasarana			
5.2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	6.600.000	1.500.000	
5.2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		1.500.000	
5.2.2	Sub Bidang Kesehatan	122.284.000	103.320.000	
5.2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	9.312.000	10.000.000	
5.2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	89.312.000	77.000.000	
5.2.2.03	Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan		2.000.000	
5.2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.500.000	10.000.000	
5.2.2.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa		400.000	
5.2.2.06	Pengasuh Bersama atau Bina Keluarga Balita	11.160.000	1.920.000	
5.2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD		2.000.000	
5.2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88.887.000	773.000.000	
5.2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	0	193.000.000	
5.2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	5.000.000	
5.2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	0	10.000.000	
5.2.3.11	Pembangunan / Peningkatan Jaalan Lingkungan Pemukiman /Gang	0	160.000.000	
5.2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan jalan usaha Tani	78.622.000	160.000.000	
5.2.3.13	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Milik Desa	0	30.000.000	
5.2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	10.265.000	200.000.000	
5.2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	0	4.000.000	
5.2.3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		4.000.000	
5.2.3.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		4.000.000	
5.2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa		3.000.000	
5.2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
5.2.4.01	Dukungan Pelaksanaan program Pembangunan/rehab Rumah tidak layak huni		1.000.000	
5.2.4.02	Pemeliharaan sumur resapan milik desa		1.000.000	

5.2.4.07	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan desa/pemukiman sampah		5.000.000	
5.2.4.10	Pembangunan/peningkatan sumur resapan		1.000.000	
5.2.4.13	Pembangunan/peningkatan sanitasi pemukiman		1.000.000	
5.2.4.15	Pembangunan/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/Pemukiman		1.000.000	
5.2.4.18	Pembangunan/peningkatan fasilitas Jamban/MCK GAKIN		10.000.000	
5.2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
5.2.5.02	Pengelolaan lingkungan hidup Desa		10.000.000	
5.2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		2.500.000	
5.2.6	Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika	450.000	4.000.000	
5.2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		2.000.000	
5.2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komuniiasi dan Informasi Lokal desa		2.000.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	47.180.000	81.200.000	
5.3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.105.000	20.000.000	
5.3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000	45.000.000	
5.3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	2.550.000	20.000.000	
5.3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.525.000	26.200,000	
5.3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.250.000	5.000.000	
5.3.4.03	Pembinaan PKK	9.040.000	5.000.000	
5.3.4.99	Lain -lainSub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.300.000	5.000.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	159.307.868	156.212.000	
5.4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	147.307.868	120.000.000	
5.4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/KETAHANAN PANGAN	22.500.000	20.000.000	
5.4.2.06	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sa;uran irigasi tersier/ederhana	109.807.868,03	55.000.000	
5.4.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan peternakan/KETAHANAN PANGAN	15.000.000	45.000.000	

5.4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000	18.000.000	
5.4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	
5.4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000	7.500.000	
5.4.3.3	Peningkatan Kapasitas BPD		7.500.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	38.591.500	77.000.000	
5.5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.591.500	15.000.000	
5.5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		5.000.000	
5.5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000	57.000.000	
	JUMLAH BELANJA	1.597.837.768,03	2.085.409.400	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Malangsari

Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
6.	Pembiayaan	35.287.868,03	40.000.000	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	40.287.868,03	45.000.000	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	40.287.868,03	45.000.000	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000	5.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000	5.000.000	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2024 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2024 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2024. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	594.300.040	623.222.964
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	36.690.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	265.717.080	286.964.400
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.000.000	20.656.164
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	58.300.000	52.772.400
05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	17.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	6.000.000	5.075.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000	28.190.000
08	Tambahan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.000.000	23.000.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	143.010.000	152.775.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	40.630.715	102.735.936
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	12.000.000	21.500.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000	54.180.936

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	23.630.715	27.055.000
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.500.000	4.396.000
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2.500.000	0
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	15.000.000	2.636.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	2.000.000	0
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.500.000	0
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.500.000	1.760.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	0	0
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	38.967.500	27.237.500
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.800.000	3.360.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.740.000	4.240.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	7.165.000	11.865.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.000.000	0
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.655.000	2.655.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	0	0
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	307.500	307.500
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0	0
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	0	0
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	1.500.000	0
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	0	0
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	15.000.000	0
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	37.110.000	35.545.000
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	0	0
02	Administrasi Pertanahan	0	0
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	5.000.000	0
04	Mediasi Konflik Pertanahan	0	0
05	Penyuluhan Pertanahan	2.500.000	0
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.610.000	27.045.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6.000.000	8.500.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 31 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 23 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 0.741 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.000	30.575.000	belum tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	286.964.400	239.237.000	belum tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.656.164	17.182.340	belum tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	52.772.400	35.841.599,54	belum tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	14.250.000	belum tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	5.075.000	3.275.000	belum tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.190.000	23.480.500	belum tercapai
8.	Tambahan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.000.000	21.991.100	belum tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	152.775.000	89.118.750	belum tercapai
10.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran	21.500.000	7.000.000	belum tercapai
11.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	54.180.936	0	belum tercapai
12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	27.055.000	0	belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
13.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.636.000	0	belum tercapai
14.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.760.000	1.432.000	belum tercapai
15.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3.360.000	1.745.000	belum tercapai
16.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.240.000	1.740.000	belum tercapai
17.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	11.685.000	2.020.000	belum tercapai
18.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	2.655.000	0	belum tercapai
19.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	307.500	307.500	Tercapai
20.	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.000.000	belum tercapai
21.	Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	27.045.000	0	belum tercapai
22.	Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	8.500.000	0	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 21 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	348.600.000	348.000.000
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	41.400.000	41.400.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	5.000.000	0
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	1.000.000	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	0	0
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	0	0
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	300.000.000	300.000.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	0	0
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	600.000	6.600.000
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0	0
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	600.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	0	0
2.2	Sub Bidang Kesehatan	114.500.000	122.284.000
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	10.000.000	9.312.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	80.000.000	89.312.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.000.000	0
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000	12.500.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	0	0
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	10.000.000	11.160.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	2.000.000	0
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	500.000	0
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	0	0
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	810.000.000	88.887.000
01	Pemeliharaan Jalan Desa	375.000.000	0
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0	0
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	0
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	0	0
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	0	0
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0	0
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	5.000.000	0
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	0	0
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	100.000.000	0
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	115.000.000	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	170.000.000	78.622.000
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	20.000.000	
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	20.000.000	10.265.000
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	5.000.000	0
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	0	0
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	0	0
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	0	0
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	16.000.000	0
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	0	0
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	1.000.000	0
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0	0
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	0	0
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		0
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	0	0
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	0	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	0	0
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	0	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0	0
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	0	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	10.000.000	0
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	0	0
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	0	0
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	5.000.000	0
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	0	0
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.500.000	0
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	0	0
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	10.000.000	0
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.500.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0
		0	0
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	1.500.000	450.000
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	0	0
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.500.000	450.000
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	0	0
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	5.000.000	0
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0	0
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	5.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0
2.8	Sub Bidang Pariwisata	5.000.000	0
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0	0
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0	0
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	5.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 28 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 10 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 0.357%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	41.400.000	34.500.000	Belum tercapai
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	300.000.000	298.599.500	Tidak tercapai
3.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	6.600.000	500.000	Belum tercapai
4.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	9.312.000	8.012.000	Belum tercapai
5.	Penyelenggaraan Posyandu	89.319.000	58.558.000	Belum tercapai
6.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.500.000	7.255.000	Belum tercapai
7.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.160.000	10.960.000	Belum tercapai
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Penerasan jalan tani	78.622.000	78.622.000	Tercapai
9.	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan	10.265.000	6.710.000	Belum tercapai
10	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	450.000	300.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 8 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	32.755.000	17.105.000
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0	0
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	10.255.000	0
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	10.000.000	17.105.000
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000	0
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	5.000.000	0
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	2.500.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	0	0
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000	3.000.000
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		0
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	20.000.000	3.000.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	0	0
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	20.500.000	2.550.000
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	0	0
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	5.000.000	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	5.000.000	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	5.000.000	0
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	5.500.000	2.550.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	0	0
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.200.000	4.935.000
01	Pembinaan Lembaga Adat	5.000.000	0
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000	5.250.000
03	Pembinaan PKK	10.000.000	9.040.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	4.935.000
90	Pembinaan Karang Taruna	1.200.000	0
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000	5.300.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024

sebanyak 14 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 0.571%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Koordinasi Pembinaan ,Keamanan Ketertiban& Perlindungan Masyarakat Desa	17.105.000	0	Belum Tercapai
2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	3.000.000	3.000.000	Tercapai
3.	Pembinaan Karang Taruna	2.550.000	2.350.000	Belum Tercapai
4.	Pembinaan LPM	5.250.000	1.000.000	Belum Tercapai
5.	Pembinaan PKK	9.040.000	6.160.000	Belum Tercapai
6.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.935.000	3.321.000	Belum Tercapai
7.	Lain-Lain Sub bidang kelembagaan Desa	5.300.000	0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi: Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	0	0
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	93.000.000	147.307.868,03
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	5.000.000	0
02	Peningkatan Produksi Peternakan	5.000.000	0
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	10.000.000	0
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	23.000.000	22.500.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	5.000.000	0
06	Pembangunan/Rehabilitasi//Peningkatan Saluran Irigasi	50.000.000	109.807.868,03
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	5.000.000	15.000.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.500.000	12.000.000
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000	9.000.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000	0
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.000.000	0
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000	0
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000	0
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	2.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.000.000	0
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	5.000.000	0
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	0	0
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	2.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.500.000	0
01	Pembentukan BUM Desa	0	0
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	2.500.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	0
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	0	0
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	0	0
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	0	0
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 17 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 0.294%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	22.500.000	18.000.000	Belum tercapai
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi	109.807.868,03	0	Belum tercapai
3.	Lain-lain sub bidang Pertanian	15.000.000	15.000.000	tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	0	Belum

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
5.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000	0	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000	2.591.500
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000	0
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000	36.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 0.666%.

- 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.591.500	1.800.000	Belum tercapai
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000	27.000.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Malangsari sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penerimaan Desa terlambat dari Daerah
2. Pekerjaan Pembangunan Kantor terhabat cuaca
3. Pembayaran Siltap, Tunjangan, Insentif dan Jaminan Sosial terlambat
4. Dukungan Fasilitas Kinerja Masih Kurang
5. Tata kelola administrasi masih kurang memadai

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Penerimaan Desa terlambat dari Daerah
2. Pembangunan Terkendala masalah Cuaca/ Hujan
3. Dukungan Fasilitas Kinerja Masih Kurang

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Penerimaan Desa terlambat dari Transfer Daerah
 2. Insentif dan Honor Terlambat.
 3. Kurangnya Pembinaan keamanan Pelatihan dan Pembinaan Linmas
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Penerimaan Desa terlambat dari Daerah
 2. Pemeliharaan Saluran terkendala Cuaca Hujan
 3. BUM Desa kurang Maksimal.
 4. Kurangnya masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan saluran
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
1. Penerimaan Desa Terlambat transfer dari Daerah
 2. Penerimaan BLT DD kadang ada pergantian karena meninggal
 3. Kurangnya masyarakat tentang Kesadaran lingkungan
 4. Tanggap Kesiapsiagaanya Bencana masih rendah.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2024 dan permasalahan pembangunan di Desa Malangsari yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2025.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 3) RKP Desa Tahun 2025
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 5) Perubahan RKP 2025
 - b. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
 - c. Sarana Prasarana Pemerintah Desa
 - d. Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan.
 - e. Pertanahan
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Kawasan Pemukiman
 - e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- f. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - g. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - h. Pariwisata
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Kebudayaan dan Keagamaan
 - c. Kepemudaan dan Olah Raga
 - d. Kelembagaan Masyarakat
 4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pertanian dan Peternakan
 - b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - c. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
 - d. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - e. Dukungan Penanaman Modal
 - f. Perdagangan dan Perindustrian
 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Pendataan Anak Putus Sekolah.

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025 (Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2025

DESA : MALANGSARI
KECAMATAN : TANJUNGANOM
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Desa	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan										Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kejasama Antar Desa	Kejasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			3,16	1	1	1 Th	Desa	12 bln	Kades	36.690.000	add	√		
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			3,16	10	11	1 Th	Desa	12 bln	Parades, Staf	add	286.964.400	add	√		
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			3,16	10	11	1 Th	Desa	12 bln	Pemdes	add, pad, dd	21.856.000	add, pad, dd	√		
4		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa			3,16	1	1	1 Th	Desa	12 bln	Pemdes	dd, add, pad, slp, bh, prd	55.005.000	dd, add, pad, slp, bh, prd	√		
5	Penyediaan Tunjangan BPD			3,16, 18	5	5	1 Th	Desa	12 bln	BPD	add	17.100.000	add	√			
6	Penyediaan Operasional BPD			3,16, 18	5	5	1 Th	Desa	12 bln	BPD	dd, add, pad, slp, bh, prd	8.252.000	dd, add, pad, slp, bh, prd	√			
7	Penyediaan Insentif RT/RW			3,16, 18	21	21	1 Th	Desa	12 bln	lembaga	dd, add, pad	25.200.000	dd, add, pad	√			
8	Penyediaan operasional Pemdes yang bersumber dari Dana Desa			3,16, 18	1	1	1 Thn	Desa	12 bln	Pemdes	dd	23.800.000	dd	√			
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa			3,16	10	11	1 Th	Desa	12 bln	Kades, Parades	PAD	152.775.000	PAD	√			
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan			3,16	0	1	1 Th	Desa	paket	pemdes	20.000.000	add, pad, slp, bh, prd	√		
2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			3,9	1	1	1 Th	Desa	paket	mayarakat	5.000.000	add, pad, slp, bh, prd	add, pad, slp, bh, prd	√		
3		Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa			3,9	1	1	1 Th	Desa	paket	mayarakat	25.000.000	add, pad, slp, bh, prd	add, pad, slp, bh, prd	√		
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan			3,5,16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.000.000	DD, SLP	√		
2		Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa			3,5,16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	2.500.000	DD, SLP	DD, SLP	√		
3		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa			3,5,16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	2.000.000	DD, SLP	DD, SLP	√		
4		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			3,5,16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.600.000	DD, SLP	DD, SLP	√		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Kc	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Nama Program/Kegiatan	Detail								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	2.500.000	dd,slp	√			
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	5	4	1 Th	Desa	paket	Pemdes	2.000.000	DD,SLP	√			
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	2.625.000	DD,SLP	√			
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	6.300.000	DD,SLP	√			
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	6.000.000	DD,SLP	√			
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2	2	1 Th	Desa	paket	Pemdes	3.300.000	DD,SLP	√			
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	3	3	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.300.000	DD,SLP	√			
5	Pertanahan	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.600.000	DD,SLP	√			
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	2.000.000	DD,SLP	√			
		9	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	0	3	1 Th	Desa	paket	Pemdes	600.000	DD,SLP	√			
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	0	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	500.000	PAD,ADD,SLP	√			
		11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	0	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	7.500.000	pad,ADD,SLP	√			
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	0	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	10.000.000	add,slp,pad	√			
		91	Forum Pembina Desa	0	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	4.800.000	ADD,SLP	√			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	12	12	1 Th	Desa	paket	Pemdes	5.000.000	ADD,SLP	√			
		2	Administrasi Pertanahan	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	3.000.000	DD,SLP	√			
		5	Penyuluhan Pertanahan	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	2.500.000	DD,SLP	√			
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	23.610.000	bhprd	√			
		7	Penetapan Batas/ Patok Tanah Desa	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	3.000.000	DD,SLP	√			
		Jumlah Bidang 1										772.877.400			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	1	1	1 Th	Desa	Paket	Lembaga	41.800.000	DD	√			
				2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	1	1	1 Th	Desa	paket	lembaga	5.000.000	DD	√	
				3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	2	2	1 Th	Desa	paket	Lembaga	1.000.000	DD	√	
				8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.500.000	DD	√	
2	Kesehatan	1	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	10	0	1 Th	Desa	paket	masyarakat	1.500.000	DD/ADD/SLP	√			
				1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√	
				2	(PKD)/ Polindes Milik Desa	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
				3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	
2	Kesehatan	4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√			
				2	3, 4, 5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Kc	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
	Nama Program/Kegiatan									Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
	Bidang	5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	2, 3, 4,5	0	1	1 Th	Desa	paket masyarakat	400.000	DD	√				
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2, 3, 4,5	1	1	1 Th	Desa	12 Bln lembaga		1.920.000	DD	√			
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2, 3, 4,5	0	1	1 Th	Desa	paket masyarakat			DD	√			
			a. Posyandu	2, 3, 4,5	1	1	1	Desa	paket masyarakat	500.000	DD	√				
			b. Posyandu	1, 2, 3, 4,5	0	1	1 bln	Desa	paket Masyarakat	2.000.000	DD	√				
			Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD													
3		Pekerjaan Umum dan	1	Pemeliharaan Jalan Desa	8,11,16	1500	1	1 Th	Desa	paket masyarakat	193.000.000	DD/SLP	√			
			3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8,11,16	500	500	1 Th	Desa	250*3 m. masyarakat	5.000.000	DD/SLP	√			
			5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	8,11,16	200	200	1 th	Desa	10* 0,5 m masyarakat	10.000.000	DD	√			
			11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,8,9	250	250	1 th	Desa	250*3 m masyarakat	123.000.000	DD	√			
			12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	3,8,9,11	100	150	1 th	Desa	8*0,20 m masyarakat	160.000.000	DD/SLP	√			
			13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	3,9	1	1	1 th	Desa	6*4 m masyarakat	30.000.000	DD/SLP	√			
			14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	3,6,9,16	450	450	1 th	Desa	450*0,5 m masyarakat	200.000.000	DD/SLP	√			
			16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	6,7	0	1	1 Th	Desa	paket masyarakat	4.000.000	DD/SLP	√			
			17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	8,9,11	0	1	1 bln	Desa	paket Masyarakat	4.000.000	dd,bhprd ,pad	√			
			18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	8,9,11	0	1	1 bln	Desa	paket Masyarakat	4.000.000	dd,bhprd ,pad	√			
			20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	8,9,11	0	0	1 bln	Desa	paket Masyarakat	3.000.000	dd,bhprd ,pad	√			
4			Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	6	0	1	1 Th	Desa	paket masyarakat	1.000.000	DD	√		
	2			Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	6	0	1	1 Th	Desa	paket masyarakat	5.000.000	DD	√			
	7			Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman												
	10			Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	6	0	1	1 Th	Desa	paket masyarakat	1.000.000	DD	√			
	13			Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	3,6,7	0	1	1 Th	Desa	paket masyarakat	1.000.000	DD	√			
	15			Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	3,6,7	0	1	1 Th	Desa	paket masyarakat	1.000.000	DD	√			
	18			Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	1,3,6,7	0	5	1 Th	Desa	paket masyarakat	10.000.000	DD	√			
		Pengelolaan Hutan Milik Desa														
		Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		3,6,7	0	1	1 Th	Desa	paket masyarakat	10.000.000	DD	√				
		Pelatihan/Sosialisasi/Perkuliahan/Perenyadara n tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		3,6,7	0	1	1 Th	Desa	paket masyarakat	2.500.000	DD	√				
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1		Pengelolaan Hutan Milik Desa												
		2		Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	3,6,7	0	1	1 Th	Desa	paket masyarakat	10.000.000	DD	√			
		3		Pelatihan/Sosialisasi/Perkuliahan/Perenyadara n tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,6,7	0	1	1 Th	Desa	paket masyarakat	2.500.000	DD	√			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
7	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2	3,4,16	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√			
		3	3,4,16	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√			
		1	9	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√			
8	Energi dan Sumber Daya Mineral	2	9	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	27.000.000	DD	√			
		2	3,8,12	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	1.000.000	DD	√			
		3	3,8,12	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	1.000.000	DD	√			
Jumlah Bidang 2															
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa														
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	3,10,16	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	1.000.000	DD	√			
		2	3,10,16	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD,SLP,ADD,PA	√			
		3	3,10,16	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD,SLP,ADD,PA	√			
		4	3,13	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD	√			
		5	3,13	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD	√			
		6	3,16	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√			
2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	5,18	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	dd,slp,pad	√			
		3	18	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	10.000.000	dd,slp,pad	√			
		3	18	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	dd,slp,pad	√			
3	Kepemudaan dan Olah Raga	3	3,18	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	dd,slp,pad	√			
		4	3,18	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	dd,slp,pad	√			
		5	3,9	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	dd,slp,pad	√			
		6	3,18	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	dd,slp,pad	√			
		1	3,18	0	1	1 Th	Desa	paket	lembaga	5.000.000	dd,slp,pad	√			
		2	3,18	10	10	1 Th	Desa	paket	lembaga	5.000.000	DD,ADD	√			
4	Kelembagaan Masyarakat	3	5,18	1	1	1 Th	Desa	paket	lembaga	5.000.000	DD,ADD	√			
		4	5,18	5	5	1 Th	Desa	paket	lembaga	5.000.000	DD	√			
		90	3,18	1	1	1 Th	Desa	paket	lembaga	1.200.000	DD,ADD	√			
		91	3,18	1	1	1 Th	Desa	paket	lembaga	5.000.000	DD	√			
		Jumlah Bidang 3													
										81.200.000					

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Kc	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Peternakan 3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa 4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan * 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3,6,7,12	25	25	1 Th	Desa	paket	masyarakat	10.000.000	DD	√		
			3,6,7,12	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD	√		
			3,6,7,12	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	10.712.000	DD	√		
			3,6,7,12	1500	1500	1 Th	Desa	1500*2	masyarakat	20.000.000	DD	√		
			3,6,7,12	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	10.000.000	DD	√		
			3,6,7,12	350	350	1 Th	Desa	350*2	masyarakat	55.000.000	DD	√		
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1. Peningkatan kapasitas kepala Desa 2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa 3. Peningkatan kapasitas BPD	3,16	1	1	1 Th	Desa	paket	Kades	3.000.000	DD	√		
			3,16	11	11	1 Th	Desa	paket	Parades, Staf	7.500.000	DD	√		
			3,18	5	5	1 Th	Desa	paket	BPD	7.500.000	DD	√		
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1. Pelatihan/Perseminaran Pemberdayaan Perempuan 2. Pelatihan/Perseminaran Perlindungan Anak 1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM 2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	5	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√		
			3,16	0	1	1 bln	Desa	paket	Masyarakat	2.000.000	DD	√		
			5,16	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	7.500.000	DD	√		
6	Dukungan Penanaman Modal	90. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1. Pembentukan BUM Desa 2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa 90. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	5,16	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√		
			5,16	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√		
			8,16	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	-	DD	√		
			8,16	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√		
7	Perdagangan dan Perindustrian	3. Pengembangan Industri kecil level Desa 4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	8,9	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD	√		
			Jumlah Bidang 4						156.212.000					
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	00. Penanggulangan Bencana 00. Keadaan Darurat 00. Keadaan Mendesak	13	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	15.000.000	DD	√		
			2, 3, 13	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD,SLP	√		
			2, 3, 16	50	50	1 Th	Desa	paket	masyarakat	57.000.000	DD,SLP	√		
			Jumlah Bidang 5						77.000.000					
			Jumlah TOTAL						2.045.409.400					

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).


KEPALA DESA MALANGSARI,
MUJIANTO